

# MENGUKUR KOMITMEN DAN KAPABILITAS KABINET INDONESIA BERSATU DALAM MEMBAWA PERUBAHAN BANGSA: BIDANG PENDIDIKAN

Oleh  
Dr. Rochmat Wahab, MA

## Pengantar

Bangsa Indonesia menuju ke arah perubahan bangsa secara potensial dan aktual menghadapi persoalan internal dan eksternal. Secara internal, bangsa Indonesia masih berada dalam kondisi krisis yang berkepanjangan, terlebih-lebih terkait dengan kemampuan kerja maupun moral. Secara eksternal, semakin sengitnya kompetisi global dan masuknya budaya asing yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai bangsa.

Kondisi-kondisi tersebut dapat merupakan tantangan dan hambatan bangsa Indonesia dalam percaturan hidup di tengah-tengah kehidupan global. Memang bangsa Indonesia dalam era informasi dewasa ini tidak dapat menghindarkan diri, namun sebaliknya harus terus mengupayakan dalam pengembangan diri baik secara individual maupun kolektif.

Keinginan melakukan perubahan - yang menjadi tekad pemerintahan baru Indonesia - merupakan suatu komitmen yang sangat patut dihargai dan disambut, terlebih-lebih di bidang pendidikan. Perubahan di bidang pendidikan dapat menjadi langkah yang sangat strategis, karena menyentuh pada pelaku perubahan dan pembangunan bangsa menuju Indonesia baru.

## Persoalan Pendidikan di Indonesia

Banyak persoalan pendidikan yang dihadapi bangsa Indonesia, yang sungguh menuntut pemerintah baru dan masyarakat untuk terlibat di dalamnya. *Pertama*, keterbatasan akses pendidikan anak bangsa akibat ketidakberuntungan ekonomis, geografis, budaya, kondisi fisik, dan sebagainya. Terbatasnya akses pendidikan bagi anak bangsa, tidak hanya karena mahal biaya pendidikan, jauhnya tempat pendidikan, bias gender, melainkan juga kecacatan.

*Kedua*, rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Rendahnya intake, proses, dan prestasi lulusan, sehingga dapat berpengaruh terhadap kemampuan lulusan untuk menghadapi kompetisi di tengah-tengah masyarakat, bahkan di tengah percaturan ekonomi global. Namun yang jauh lebih penting adalah rendahnya kualitas pendidikan dapat berpengaruh terhadap kepribadian dan moralitas bangsa.

*Ketiga*, rendahnya efisiensi pengelolaan pendidikan karena masih banyak praktek KKN. Rendahnya efisiensi pengelolaan pendidikan dapat mengurangi produktivitas pendidikan, sehingga menyebabkan pendidikan berbiaya tinggi, yang pada akhirnya praktek pendidikan yang terjadi hanya untuk sejumlah kecil anak bangsa.

---

*\*Dibahas pada Seminar Nasional The New Life of Indonesia dengan Tema mengukur Komitmen dan Kapabilitas Kabinet Indonesia Bersatu dalam membawa Perubahan Bangsa\*, yang diselenggarakan pada Rabu, 1 Desember 2004 di Aula Fakultas Ekonomi UNS.*

*Keempat.* masih banyak guru dan dosen yang belum menunjukkan kualifikasi yang memadai. Akibatnya kualitas proses dan produk pendidikan kurang dapat dijamin.

*Kelima,* para birokrat dan politisi belum menunjukkan *political will* yang menggembirakan terhadap pendidikan. Akibatnya pendidikan belum dianggap sebagai faktor kunci untuk melakukan perubahan bangsa.

*Keenam,* masih rendahnya kepedulian dan partisipasi para dunia usaha dan bisnis terhadap pendidikan. Akibatnya pembiayaan pendidikan hanya bertumpu pada pemerintah dan orangtua. Sungguh berat yang harus ditanggung oleh masyarakat, padahal stakeholders pendidikan juga para dunia usaha dan industri.

### **Menuju Perubahan Bangsa**

Perubahan merupakan kata kunci yang sangat penting dan strategis untuk memberikan jawaban terhadap krisis yang dilanda bangsa Indonesia dewasa ini, terlebih-lebih kondisi krisis ini nampak masih belum menentu titik akhirnya. Jika diperhatikan benar sikap `hipokrit` bangsa, terutama para pengambil keputusan masih lebih menguasai setiap langkah upayanya, di samping memang penyelesaian krisis bangsa masih bersifat parsial, belum komprehensif.

Paradigma kepemimpinan bangsa memang harus dirubah. Perubahan itu dapat diwujudkan dalam berbagai hal. Pertama, visi kepemimpinan bahwa pimpinan bukanlah penguasa, melainkan pelayan, pemegang amanah, dan khalifah Allah di bumi dan sekaligus sebagai hamba-Nya. Kedua, pimpinan dipandang bukan hanya sebagai bos atau manager, melainkan *leader* yang menjadikan warga negara sebagai subjek. Ketiga, manajemen terbuka menjadi prinsip dalam mengemban kepemimpinan pada semua level. Keempat, hubungan antar pimpinan lebih bersifat networking, daripada hirarkhis. Kelima, pemberdayaan terhadap masyarakat merupakan kunci pembangunan bangsa.

### **Mengkritisi Visi dan Kebijakan Kabinet Indonesia Baru bidang Pendidikan**

Berdasarkan tekad Kabinet Indonesia Bersatu, bahwa Kabinet Indonesia Bersatu memiliki komitmen untuk melakukan Kontrak Politik. Kontrak politik di antaranya dapat diwujudkan agenda 100 hari dan agenda jangka menengah, 5 tahun.

1. Agenda 100 hari Depdiknas
  - a. Kebijakan **perbukuan** tingkat SD s.d SM yang customer oriented dengan ketentuan keberlakuan buku teks untuk 5 tahun.
  - b. **Kebijakan SPP** dengan sistem subsidi silang, disertai dengan sistem governance yang baik untuk penarikan, penyimpangan, penggunaan, pembukuan, dan pertanggungjawaban dana masyarakat.
  - c. Bekerja sama dengan pemerintah daerah tertentu memberlakukan ketentuan **Wajib Belajar 12 tahun** di daerahnya melalui instrumen hukum perda.

- d. Menganangkan **guru** sebagai suatu profesi seperti halnya akuntan, dokter, pengacara, dlsb yang bersertifikat dan bernomor register, serta memiliki kode etik.
- e. **Magang kepala sekolah** dari daerah tertinggal pada sekolah dari daerah maju.
- f. Reskrutrisasi Depdiknas dengan menghilangkan Dirjen Olahraga dan membagi **Dirjen Dikdasmen** menjadi Dirjen Dikdas dan Dikmenum.

Jika memperhatikan enam butir agenda Depdiknas **100 hari** nampak bahwa Menteri belum sepenuhnya memahami persoalan pendidikan nasional, bahkan yang jauh lebih penting adalah UU RI. No 20 tahun 2003. Ada beberapa hal penting yang patut direnungi, di antaranya:

- Persoalannya bukan soal waktu membikin ketentuan atau aturan yang menyangkut pengadaan buku, namun substansi yang dipandang penting dari pengadaan buku. Bahwa kehadiran buku teks tidak bisa dipisahkan dari kurikulum yang menjadi acuannya. Kurikulum selama selalu berkisar usianya selama sekitar 10 tahun, tetapi mengapa buku teks dibatasi hanya lima tahun. Jika terjadi perubahan informasi dan perkembangan ilmu dan teknologi, akan lebih efisien manakala yang dilakukan adalah membuat buku atau teks suplemen untuk bagi guru, bukan melakukan perubahan buku bagi siswa, karena cara ini memerlukan biaya tinggi.
- Kebijakan SPP sebenarnya hanya berlaku untuk SMA, tetapi untuk SD dan SMP seharusnya tidak ada, karena sebagai konsekuensi dari Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun. Baik untuk biaya di sekolah negeri maupun swasta, biaya pendidikan dasar minimal wajib ditanggung oleh pemerintah. Jika ada sekolah yang menghendaki biaya untuk peningkatan proses pendidikan sebagai konsekuensi dari program dapat dilakukan melalui pembicaraan dengan komite sekolah, apakah akan terjadi subsidi silang atau apapun cara lainnya yang dapat diterima oleh orangtua pada khususnya.
- Upaya ini baik sekali untuk mendorong daerah-daerah tertentu yang sudah berhasil menuntaskan Wajar 9 tahun. Namun jumlah daerah propinsi dan kabupaten/kota yang sudah berhasil baru dalam hitungan jari, masih banyak sekali yang belum berhasil. Jika persoalan pemerataan yang menjadi kepeduliannya, justru perlu dicari alternatif cara yang dapat mengakselerasi penuntasan Wajar 9 tahun.
- Memantapkan status guru sebagai jabatan profesional bukanlah merupakan upaya singkat, namun membutuhkan proses yang panjang. Yang dapat dilakukan untuk jangka pendek hanya yang bersifat administratif saja, misalkan terkait dengan peraturan perundang-undangan yang sudah lama menjadi bahan kajian semua pihak. Namun sangat disayangkan bahwa konsep UU Guru hanya lebih terkait dengan aspek kesejahteraan, perlindungan hukum, dan

status sosial guru, padahal yang jauh lebih berarti adalah peningkatan kompetensi dan mutu guru.

- Upaya magang kepala sekolah daerah tertinggal ke daerah maju bukanlah suatu yang baru, karena selama ini sudah ada program semacam ini, bahkan lebih baik termasuk mengirim kepala sekolah daerah maju ke daerah tertinggal sebagai upaya pendampingan langsung. Dengan demikian terjadi sharing dua arah. Tentu saja tidak menutup kemungkinan antar kepala sekolah di suatu provinsi saja, karena ada sisi positif yang dapat diambil, yaitu kesamaan latar belakang sosial dan budaya.
- Pembagian Dirjen Dikdasmen menjadi dua direktorat jenderal mengindikasikan bahwa adanya keterbatasan pemahaman terhadap otonomi pendidikan yang selama ini sedang berproses. Tugas pokok dan fungsi Dirjen Dikdasmen yang semula dimiliki pada era sentralisasi, sebagian besar telah dialihkan ke dinas kota/kabupaten, sehingga tidak cukup alasan untuk membagi dua dirjen, jika ingin menghendaki peningkatan efisiensi pengelolaan pendidikan.

## 2. Agenda **Depdiknas 5 tahun ke depan**

- a. Penyelenggaraan pendidikan jalur formal yang terkait dengan kondisi institusi dan **peserta didik** yang didukung oleh kontitusi yang ada dan **rasa keadilan**.
- b. Penyelenggaraan pendidikan jalur non formal lebih diorientasikan kepada layanan pendidikan sebagai **pengganti, penambah, dan atau pelengkap pendidikan formal dan tetap berbasis pada masyarakat**.
- c. Pendidikan nasional diorientasikan membangun **manusia seutuhnya**.
- d. **Kurikulum dan Standar Kompetensi Nasional** diharapkan mampu mengantar peserta didik memiliki kompetensi sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikannya.
- e. **Ujian Akhir Nasional** masih diperlukan untuk kendalikan mutu, terutama untuk SD sampai dengan SM.
- f. **Guru** dikembangkan menjadi sebuah profesi seperti halnya akuntan, dokter, pengacara, dlsb yang bersertifikat dan bernomor register, serta memiliki kode etik.
- g. Untuk mengendalikan mutu proses pendidikan pada jalur dan jenjang pendidikan manapun, pemerintah bertanggung jawab menetapkan buku tertentu sebagai buku acuan bagi peserta didik.
- h. Setiap lembaga pendidikan mengembangkan **sarana perustakaan sesuai dengan status dan fungsinya**.
- i. **Prasarana dan sarana** (selain perpustakaan dan buku) dilakukan oleh lembaga pendidikan di bawah pengawasan lembaga perwakilan stakeholders yang relevan.

- j. Pembiayaan pendidikan belum berhasil diperjuangkan **sebanyak 20%** dari konstitusi, sehingga masyarakat diharapkan dapat memberikan kontribusinya.
- k. **Pengendalian mutu pendidikan** secara menyeluruh dilakukan melalui penjaminan mutu dan akreditasi.

Jika memperhatikan kebijakan pendidikan nasional 5 tahun ke depan, maka ada beberapa catatan penting yang perlu diperhatikan, yaitu di antaranya:

- Untuk menghasilkan suatu praktek penyelenggaraan pendidikan formal perlu ketuntasan dalam pemahaman terhadap kondisi obyektif peserta didik dan kemampuan institusi.
- Pada prakteknya tidak semua jalur pendidikan non formal mampu menerapkan misinya, karena tidak semua pelaku pendidikan di masyarakat memiliki kesanggupan dan tanggung jawab dalam pelaksanaan pendidikan yang dikelola oleh masyarakat.
- Paradigma membangun manusia, merupakan suatu yang ideal, tetapi dalam implementasinya ternyata tidak mudah,.
- Kurikulum yang diorientasikan untuk menghasilkan lulusan yang kompeten memang sangat penting, namun dalam implementasinya perlu memungkinkan peserta didik dapat menjadi agen perubahan dan mampu menyesuaikan dengan tuntutan pembangunan.
- Ujian Akhir Nasional masih dipandang sebagai aspek penting dalam pengendalian mutu pendidikan, terutama untuk SD sampai dengan SM. Namun UAN seyogyanya bukan dianggap sebagai satu-satunya variabel penting dalam penentuan kelulusan, apalagi dikaitkan dengan rumusan tujuan institusional pendidikan.
- Dalam pengelolaan guru, menjadikan guru sebagai suatu profesi merupakan upaya yang sungguh terpuji, namun untuk penentuan keprofesionalan guru, organisasi profesi dewasa ini masih belum dapat dipercaya sepenuhnya menjadi satu-satunya lembaga penentu. Dengan demikian Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan masih bisa diberikan kepercayaan untuk mengemban amanat ini.
- Untuk pengendalian mutu proses pendidikan memang pemerintah yang didukung tim yang kompeten cukup tepat dapat menentukan buku teks bagi peserta didik, namun untuk pendidikan tinggi sepenuhnya berada di tangan dosen yang mengampunya.
- Perjuangan untuk berhasilnya anggaran 20% untuk pendidikan perlu disikapi secara kritis, karena pada tataran implementasinya perlu disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya. Bisa saja di daerah tertentu, anggaran yang perlu disiapkan untuk ukuran kualitas tertentu, cukup tersedia 18%, dari APBD namun di daerah lain, anggaran yang perlu diapkan untuk ukuran kualitas yang sama perlu disiapkan sejumlah 25% dari APBD.
- Pengendalian mutu pendidikan perlu terus dilakukan sebagai pertanggungjawaban terhadap masyarakat. Namun kehadiran misi

penjaminan mutu dan akreditasi perlu didukung dengan akuntabilitas kinerjanya, karena seringkali lebih dipentingkan formalitas administratifnya saja.

### **Alternatif Solusi kebijakan bidang Pendidikan**

#### *1. Melakukan baseline survey*

Baseline survey merupakan upaya yang strategis untuk membangun suatu data base, yang pada akhirnya sangat bermanfaat bagi pembuatan rencana baik jangka pendek, menengah, maupun, panjang.

#### *2. Rekrutmen dan pembinaan guru*

Rekrutmen guru dan tenaga kependidikan lainnya yang dilakukan secara profesional, sangatlah berarti bagi rekrutmen yang dibangun lebih bersifat administrative dan politis.

#### *3. Mempercepat launching RPP*

Untuk dapat mempercepat implementasi UU Sisdiknas perlu dipercepat proses penyelesaian draf dan pendeklarasian PP-PP-nya, sehingga dapat dijadikan pijakan dalam operasional penyelenggaraan pendidikan.

#### *4. Kebijakan UAN*

Untuk mengebdalikan mutu pendidikan perlu dilakukan UAN secara bertanggung jawab.

#### *5. Kurikulum baru*

Kurikulum baru yang sudah diujicobakan perlu segera diresmikan dan diluncurkan, sehingga ada kejelasan langkah kegiatan pendidikan di lapangan

#### *6. Pajak pendidikan*

Untuk membantu pengadaan dana pendidikan perlu ada pajak pendidikan bagi dunia usaha dan inidustri.

#### *7. Pembebasan SPP dan subsidi minimal*

Pembebasan SPP perlu dilakukan bagi semua siswa SD dan SMP yang diwujudkan berupa sumbangan minimal untuk operasional pendidikan, sedangkan bagi siswa berkemampuan tinggi yang tak mampu secara finansial perlu dibebaskan SPP-nya.

#### *8. KKN di lingkungan Depdiknas*

Untuk menjamin pemerintahan bersih di lingkungan Depdiknas, perlu dibersihkan praktek-praktek KKN dengan tetap berkoordinasi dengan sektor lain.

### 9. Pemberantasan Narkoba

Untuk menjamin keberhasilan pendidikan bagi generasi penerus, maka upaya pemberantasan narkoba di semua lini perlu terus dilakukan secara intensif dan koordinatif.

### **Penutup**

Ada kesan bahwa pendidikan belum dijadikan panglima dalam program pembangunan Kabinet Indonesia Bersatu, sehingga belum banyak berharap bahwa krisis dapat diselesaikan dalam waktu yang dekat, karena manusia sebagai pelaku utama pembangunan belum menjadi prioritas dalam kebijakan dan program Kabinet Indonesia Bersatu. Demikian beberapa pokok pikiran yang dapat dijadikan bahan untuk men-*encourage* peserta dalam menghasilkan ide-ide yang dapat memberikan solusi dalam persoalan pendidikan yang lebih luas.